



PIMPINAN DPRD PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 12 /DPRD/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
 2. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 180/Hukum/907 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Hasil Penyusunan Propemperda Tahun 2025;
 3. Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2024;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 26 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan kewenangan provinsi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo melaksanakan agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah yang tersisa pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

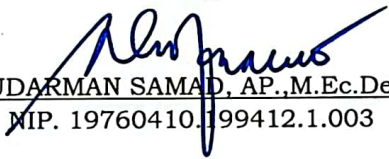
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

~~WAKIL KETUA~~

SOFYAN PUHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI GORONTALO,


SUDARMAN SAMAD, AP., M.Ec.Dev.
NIP. 19760410.199412.1.003

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Yth. Pj. Gubernur Gorontalo.
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Yth. Ketua-Ketua Komisi DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Yth. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo.
6. Yth. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
7. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.

NOMOR : 12 / DPRD / VIII / 2024

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD.											
1	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi.	✓		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah bersamaan dengan urusan bidang olahraga.	✓		Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	
2	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.	Untuk meningkatkan pemberdayaan pengusaha lokal dalam menghadapi persaingan global serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.	✓		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	✓		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2025	

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
3	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Pembentukan Badan Aset Daerah guna pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan transparan.	5	6	Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	8	9	Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	12
4	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja berperan penting dalam pembangunan, sehingga harus dilindungi harkat dan martabatnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja.	✓		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.			Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	
5	Peraturan daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.	Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender.	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.		✓	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II RANPERDA YANG BERASAL DARI GUBERNUR.											
6	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029	Penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2045.	✓		Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.	✓		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	
7	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Menyesuaikan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.		✓	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	
III RANPERDA KUMULATIF TERBUKA.											
1	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024							Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	
2	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025							Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026							Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	Tahun 2025	

DPRD PROVINSI GORONTALO
 WAKIL KETUA,

 SOFYAN PUHI